



ISSN:
2655-6944

ELASTISITAS

<http://elastisitas.unram.ac.id>

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 6, No. 2, September 2024

ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PENCAPAIAN VISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Fitra Ria Silvida^{1*}, Muhammad Dzul Fadlli²

¹Fakultas Ekonomi Bisnis dan Informatika, Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, Indonesia

²Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Info Artikel

ABSTRAK

Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran, Visi Misi Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Anggaran dan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara pada OPD-OPD Kabupaten Mojokerto. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengelolaan anggaran dengan kinerja keuangan, dengan koefisien regresi sebesar 0,290 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Artinya, setiap perbaikan pengelolaan anggaran akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

ABSTRACT

Keywords: Budget Management, Local Government Vision and Mission and Financial Performance.

This study uses a quantitative approach to analyze Budget Management on Financial Performance and achievements of the vision and mission of the Mojokerto district government. The population of this study were Civil Servants in OPDs in Mojokerto Regency. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The findings of this study can be concluded that good budget management has a crucial role in improving the financial performance of local governments. The study shows a significant positive relationship between budget management and financial performance, with a regression coefficient of 0.290 and a significance value of 0.001. This means that every increase in budget management will have an impact on improving financial performance, which in turn supports the achievement of the regional vision and mission.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi pembangunan ekonomi di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan nasional diatur melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan desentralisasi, daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri dan mendapat dukungan dalam pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibat kebijakan tersebut, beberapa aturan yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat kini telah diadaptasi menjadi kebijakan daerah, termasuk dalam urusan pengelolaan keuangan. Proses transisi ini menuntut setiap instansi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan efektif (*good governance*). Kebutuhan akan sistem pemerintahan juga dipenuhi oleh tuntutan masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan yang unggul, transparan, dan akuntabel. Desentralisasi pembangunan ekonomi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, mendukung otonomi daerah, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah (Setiani, 2024; Larasati, 2017).

Pengelolaan Anggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah (Mandasari & Darajat, Tubagus Ahmad Nurhasanah, 2024; Fitriani, 2022; Abidin & Herawati, 2018). Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah mewujudkan kabupaten yang maju, adil, dan makmur dengan fokus pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana daerah mencapai visi dan misi melalui program-programnya (Sains, 2018; Yusrianti & Safitri, 2015). Melalui laporan kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan program.

Laporan ini penting dalam rangka merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan dalam perencanaan anggaran yang lebih efektif serta metode atau teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam rangka mencapai visi. Selain itu, kinerja keuangan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa dana masyarakat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah (Ramadana, dkk, 2023; Rahman & Rachman, 2021). Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Pengelolaan belanja yang baik tidak hanya menyangkut penggunaan dana saja, namun juga mencakup pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas penggunaannya. Pengelolaan belanja yang baik dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan serta mendukung visi daerah yang berorientasi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Cottalismewati et al., 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan. Secara umum pengelolaan keuangan daerah sering mengalami permasalahan ketika proses perencanaan dan penganggaran tidak dilaksanakan dengan baik. Permasalahan yang sering muncul antara lain kurang efektifnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui musrenbang, serta dominasi kebijakan oleh bupati. Selain itu, terdapat permasalahan seperti perencanaan yang terpisah dari anggaran karena kurangnya kualitas dan kuantitas perencana di OPD, serta indikator pencapaian yang tidak jelas dan tidak terukur. Kelemahan lainnya adalah belum adanya analisis mendalam yang harusnya lebih fokus pada bagaimana mencapai target dibandingkan sekedar memuaskan kepentingan tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya insentif untuk meningkatkan kontribusi masing-masing OPD dalam perencanaan dan koordinasi kegiatan antar OPD agar tidak terjadi ego sektoral dalam kegiatan dan ketimpangan antar OPD.

Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diukur hanya dari sudut pandang finansial (Murad et al., 2024). Surplus atau defisit laporan keuangan tidak selalu mencerminkan keberhasilan, terutama pada sektor publik yang tidak berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, kinerja organisasi pemerintah juga perlu dievaluasi berdasarkan efektivitasnya (Mardiasmo, 2004). Permasalahan yang umum ditemui adalah kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Solusi dari permasalahan ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan atau penambahan badan pengawasan, serta pemberian peraturan yang jelas dan tegas dengan tetap fokus pada upaya peningkatan kinerja pemerintah (Nurhaeda & Tenriola, 2022). Langkah pertama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik

adalah penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan dapat berfungsi sebagai alat untuk membawa prinsip-prinsip good governance ke tingkat yang lebih nyata, melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, serta audit atau inspeksi sektor publik (Mardiasmo, 2004).

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, dimana metode penelitian ini memadukan metode kuantitatif dan kualitatif (Ghozali, 2018). Stainback dalam (Sugiono, 2019) menyatakan bahwa setiap metode dapat digunakan untuk melengkapi metode lainnya, apabila penelitian dilakukan pada lokasi yang sama namun dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Sugiono (2019) juga menyebutkan bahwa kedua metode tersebut dapat digabungkan namun digunakan secara bergantian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengaruh pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan dan pencapaian visi pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dari masing-masing OPD diambil 3 responden yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang ditransformasikan menjadi angka-angka (Sugiono, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian (Ghozali, 2018). Data primer diperoleh melalui kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan kuesioner. Analisis data meliputi pengujian validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda, persamaan yang diperoleh adalah:

$$Y=0,346+0,290X_1$$

Hal ini mengindikasikan hubungan antara Pengelolaan Anggaran (X₂) dengan Kinerja Keuangan (Y). Persamaan ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan dapat diprediksi atau dipengaruhi oleh variabel Pengelolaan Anggaran dengan koefisien regresi sebesar 0,290.

Tabel 3.1 Hasil Uji Analisis Regresi

Variabel	Koefisien regresi	T hitung	Sig.	Keterangan
Pengelolaan Anggaran	0,290	3,333	0,001	Signifikan
Konstanta	: 0,346	F hitung	: 26,291	
R	: 0,738	Sig.	: 0,000	
R square	: 0,544			

Sumber: output SPSS Regresi Analysis, data diolah

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta a=0,346 pada persamaan regresi ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen berada dalam keadaan konstan atau tidak berubah, maka Kinerja Keuangan tetap mempunyai nilai sebesar 0,346. Dalam konteks ini, konstanta mewakili tingkat dasar atau minimum Kinerja Keuangan yang akan tetap meskipun tidak ada perubahan pada variabel independen. Hal ini penting untuk dipahami karena konstanta dalam regresi menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan selain variabel yang diteliti, seperti kondisi perekonomian secara umum, kebijakan pemerintah yang lebih luas, atau faktor eksternal lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. .

2. Koefisien Regresi Pengelolaan Anggaran (X₂)
Koefisien regresi variabel Pengelolaan Anggaran b₁=0,290 mempunyai arti penting yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pengelolaan anggaran maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan sebesar 0,290 satuan. Artinya terdapat hubungan positif antara Pengelolaan Anggaran dengan Kinerja Keuangan. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan anggaran yang dilakukan maka semakin baik pula hasil kinerja keuangan yang dicapai pemerintah daerah. Hubungan positif ini memberikan implikasi penting khususnya bagi pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, pengalokasian anggaran yang akurat, dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan dana daerah. Apabila anggaran dikelola dengan baik, hal ini tidak hanya meningkatkan hasil keuangan secara langsung, namun juga memberikan manfaat jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan tersedianya dana yang cukup untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan.

3.2. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) masing-masing variabel dengan signifikan (Sig. < 0,05) yaitu

Tabel 3.2 Hasil Uji t

Model	Unstandardized		T hitung	Sig.	Keterangan
	Coefficients				
	B	Std.Error			
Konstanta	0,000	0,437			
Pengelolaan Anggaran	0,290	0,087	3,333	0,001	Signifikan

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: output SPSS Regresi Analysis, data diolah

dikatakan signifikan jika signifikansi variabel penelitian lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0.05).

Berdasarkan Tabel 3.2, hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti Sig. < 0,05, serta nilai koefisien regresi sebesar 0,290. Koefisien regresi yang bernilai positif ini menandakan adanya hubungan yang searah, yang berarti bahwa peningkatan pada variabel Pengelolaan Anggaran akan diikuti oleh peningkatan Kinerja Keuangan Kabupaten Mojokerto sebesar 0,290 satuan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengelolaan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan OPD-OPD Kabupaten Mojokerto dapat diterima atau dibuktikan kebenarannya.

PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keberhasilan suatu pemerintahan daerah, terutama dalam upaya mencapai visi dan misinya. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian visi dan misi suatu daerah, seperti Kabupaten Mojokerto. Hasil empiris memberikan keluaran yang menunjukkan secara jelas bahwa pengelolaan anggaran berperan besar dalam pencapaian kinerja keuangan yang konsisten, ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,290 dan nilai signifikansi yang tinggi. Artinya setiap peningkatan pengelolaan anggaran maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,290 yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kedua variabel tersebut.

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi keuangan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya, termasuk dalam upaya mencapai visi

dan misinya (Mandasari & Darajat, Tubagus Ahmad Nurhasanah, 2024). Kabupaten Mojokerto misalnya, mempunyai visi menjadi kabupaten maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja keuangan yang baik memberikan gambaran seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran dalam mendukung visi. Pengelolaan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah daerah mendistribusikan sumber daya dengan lebih bijaksana, memastikan alokasi dana tepat sasaran, dan memaksimalkan hasil dari setiap program yang dijalankan (Nurhaeda & Tenriola, 2022). Pengelolaan anggaran yang efektif memastikan sumber daya keuangan digunakan secara akurat dan sesuai prioritas, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang baik juga mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian atau tindakan perbaikan jika diperlukan agar tetap berada pada jalur yang benar. Pengelolaan anggaran yang terencana dan disiplin, organisasi atau pemerintah daerah dapat meningkatkan kredibilitasnya dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Secara lebih rinci, pengelolaan anggaran yang optimal berperan dalam beberapa aspek penting terkait kinerja keuangan dan pencapaian visi misi daerah (Murad et al., 2024). Pertama, pengelolaan anggaran yang baik membantu perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus pada prioritas pembangunan daerah. Dengan penganggaran yang akurat, pemerintah daerah dapat menyalurkan dananya pada program-program yang paling mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi pilar utama dalam visi Kabupaten Mojokerto. Kedua, laporan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel, yang dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang baik, sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana masyarakat yang diamanahkan kepada pemerintah daerah digunakan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan bersama. Kinerja keuangan yang positif memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat dan berkomitmen mewujudkan janjinya melalui program-program yang bermanfaat. Ketiga, kinerja keuangan yang baik juga memungkinkan pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan secara berkala

(Verasvera, 2016). Melalui analisis kinerja keuangan, pemerintah dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, seperti program yang mungkin memerlukan efisiensi lebih lanjut atau transfer dana ke sektor yang lebih mendesak (Hafizah & Azzahra, 2024). Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian visi misi daerah, tetapi juga memastikan proses pengambilan keputusan terkait anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mandasari & Darajat, Tubagus Ahmad Nurhasanah, 2024).

Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan secara langsung, namun juga mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang Kabupaten Mojokerto. Penguatan anggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran akan terus menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Pengelolaan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah daerah menggunakan anggaran secara lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran dapat dialokasikan pada program yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan hasil yang maksimal. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cottalismewati et al., 2022), analisis dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan secara parsial (Laga, 2021; Pujiono, et al., 2016).

1. Pencapaian Visi Melalui Pengelolaan Anggaran

Kabupaten Mojokerto bertujuan menjadi kabupaten yang maju, adil, dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan anggaran yang baik mendukung tujuan ini dengan memastikan bahwa dana dialokasikan secara efektif untuk program-program yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja keuangan yang dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang merupakan bagian dari visi Kabupaten Mojokerto.

2. Efisiensi dan Efektivitas

Dengan pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan alokasi dana sejalan dengan prioritas pembangunan. Hal ini membantu pencapaian target pembangunan yang lebih terencana dan terfokus, mendukung upaya

penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan anggaran meningkatkan hasil setiap program yang berdampak langsung pada tercapainya tujuan jangka panjang Kabupaten Mojokerto menjadi kabupaten adil dan makmur.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Peningkatan kinerja keuangan memungkinkan pemerintah berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta proyek infrastruktur. Hal ini berkontribusi pada penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program yang didanai dengan baik akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, yang mendukung pencapaian visi kabupaten yang adil dan makmur.

Pengelolaan anggaran yang baik terbukti memberikan dampak positif terhadap keberhasilan kinerja keuangan organisasi. Dengan kinerja keuangan yang baik, Kabupaten Mojokerto dapat lebih efektif menggunakan anggaran untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan inti dari visinya untuk menjadi kabupaten yang maju, adil, dan sejahtera. Pengelolaan anggaran yang optimal tidak hanya mendukung tercapainya kinerja keuangan yang lebih baik, namun juga berperan penting dalam terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pengaruh pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara pengelolaan anggaran dengan kinerja keuangan, dengan koefisien regresi sebesar 0,290 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Artinya, setiap perbaikan pengelolaan anggaran akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Kinerja keuangan daerah yang baik mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi pilar utama dalam mencapai visi Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penyajian laporan kinerja keuangan yang transparan dan

akuntabel memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengelolaan anggaran yang optimal juga memungkinkan dilakukannya evaluasi kebijakan dan program secara berkala, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan anggaran dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Dengan demikian, penguatan pengelolaan anggaran menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, serta mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 248-261.
- Cottalismewati, Asmeri, R., & Silvera, D. L. (2022). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Pareso Journal*, 4(1), 149-168. <http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/523%0Ahttps://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/download/523/530>
- Fitriani, A. (2022). AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 20(1).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate. BPEE*.
- Hafizah, T. Z., & Azzahra, N. (2024). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR NEGARA DAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 274-281.
- Laga, Y. M. V. I. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Larasati, E. (2017). Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya. Modul Universitas Terbuka, retrieved from <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4440-M1.pdf>.
- Mandasari, Y. E., & Darajat, Tubagus Ahmad Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *IPM2KPE Journal*, 7(5), 2597-5234.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (Andi (ed.)).
- Murad, A., Hendri, W., Wadi, I., & Hidayat, R. S. (2024). Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 101-106.
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2), 161-170. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 68-81.
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 25-31.
- Setiani, I. (2024). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(1), 23-34.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmانيar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* Ekuitas (*Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*), 4(1), 21-46.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat). Jurnal Manajemen Maranatha, 15(2).
Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota Palembang. Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya, 13(4), 545-558.